

## Konsekuensi Demokrasi

Di hari-hari paska pemilu ini, ada orang-orang yang bersukacita karena calon yang dipilihnya memenangkan pemilu. Bahkan beberapa dari kita adalah orang-orang yang bersukacita karena menjadi pemenang pemilu. Di sisi yang lain, terdapatlah orang-orang yang bersedih, kecewa, dan mungkin juga meratap karena hasil pemilu yang tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Bahkan, beberapa dari kita adalah orang-orang yang meratapi nasib sebagai orang yang gagal menjadi pemenang pemilu. Meski sejak awal menyadari bahwa salah satu kemungkinan dari kontestasi di pemilihan umum adalah kekalahan, tetapi tidak semua orang bisa menerima dengan mudah. Inilah salah satu konsekuensi dari sistem pemerintahan demokrasi yang dipilih oleh para *founding fathers* Indonesia. Kita tidak memiliki raja yang berkuasa sampai akhir hayatnya, tetapi kita selalu memilih pemimpin bangsa kita setiap lima tahun sekali.

Yascha Benjamin Mounk, seorang ilmuwan politik dari Johns Hopkins University, menggambarkan situasi yang sedang kita alami paska pemilu ini sebagai kenormalan. Dia mengatakan bahwa dalam pemilihan umum akan ada yang menang dan akan ada yang kalah. Dalam pemilu yang sama akan dilahirkan para bintang baru atau bahkan orang yang akan menjadi legenda. Pada saat yang sama, mungkin pula dilahirkan para pecundang. Hanya waktulah yang akan menguji kelayakan orang-orang yang terpilih (Mounk, 2018, 1-2). Dalam hal ini, dalam konteks bernegara, pemimpin yang terpilih melalui pemilu bukanlah satu-satunya pihak yang menentukan jalannya hidup bersama. Mounk mengatakan, "Namun, meskipun urusan sehari-hari berjalan, bintang-bintang penunjuk arah budaya, masyarakat, dan politik tetap tidak berubah" (Mounk, 2018, 1-2). Artinya, pemberian kekuasaan kepada pemenang pemilu bukan berarti lepas tangan. Masyarakat tetap harus menghidupkan sikap kritis guna mengawal pemerintahan.

Saat ini yang mulai terdengar di masyarakat kita adalah upaya untuk mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi yang menjadi pihak terakhir penentu keabsahan hasil pemilu. Untuk beberapa kasus, keputusan MK bisa mengubah hasil pemilu, tetapi dalam sebagian besar kasus, MK tidak mengubah secara signifikan hasil pemilu. Dalam arti tertentu, upaya di MK menjadi

kesempatan terakhir untuk mengupayakan adanya perubahan dari kalah menjadi menang dan sebaliknya yang menang menjadi kalah. Selalu ada waktu di mana akhirnya orang harus menerima keputusan bersama hasil pemilu. Hal ini senada dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat seperti yang diajarkan dalam Sila ke-4 Pancasila. Pada waktu keputusan akhir belum diputuskan, orang bisa saja berjuang untuk mendebat dan mengharap keputusan memihak kepada apa yang mereka usulkan, tetapi pada waktu keputusan akhir sudah ditetapkan, saat itu yang ada adalah mendukung keputusan bersama.

Dalam hal keputusan akhir ini, orang tidak lagi berbicara mana yang lebih baik dan mana yang buruk, melainkan mencoba bersama-sama mendukung agar keputusan yang diambil secara bersama-sama membawa kepada kebaikan. Dukungan ini bisa bermakna ganda. Pertama, dukungan bisa berarti mendorong agar keputusan bersama (dalam hal pemilu berarti pemerintahan dan perwakilan yang terpilih) berjalan dengan baik. Kedua, dukungan bisa berarti menghidupkan mekanisme kontrol agar pemerintahan dan perwakilan di Indonesia bisa menjalankan tugas dan kewajiban mereka dalam jalur yang benar demi kebaikan seluruh bangsa Indonesia. Sarana menyampaikan pendapat itu amat banyak. Secara institusional, DPR, DPD dan DPRD di berbagai tingkatan memang diadakan sebagai mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Sementara, di luar itu, terdapat berbagai saluran berpendapat yang bisa digunakan. Salah satunya adalah melalui media massa komunikasi atau yang lebih dikenal sebagai pers. Dalam konteks Indonesia, Reformasi 1998 menjadi momen kelahiran kemewahan yang sampai hari ini masih bisa kita nikmati bersama bernama kebebasan pers. Sekali lagi, kebebasan pers ini pun adalah konsekuensi atau dalam hal ini kemewahan yang diberikan oleh sistem politik demokrasi yang kita anut bersama.

### **Media Sosial dan Eskalasi Kekecewaan**

Sejak 2014, pemilu di Indonesia diiringi oleh hadirnya media sosial yang secara massif mempengaruhi jalannya demokrasi. Berbeda dari media mainstream yang wajib menerapkan kode etik jurnalistik, media sosial tidak selalu melakukan hal tersebut. Sementara kode etik jurnalistik berbicara tentang *check* dan *re-check*, tidak menyerang pribadi tertentu dan menjaga independensi, media sosial bisa saja dengan sengaja memberitakan berita yang memang

dirancang untuk menjatuhkan pihak yang berseberangan di satu sisi dan menaikkan pihak yang dibela di sisi yang lain. Jumlah dari berita-berita semacam ini terus menerus bertambah karena ada orang-orang yang bekerja untuk memproduksi berita-berita serupa. Dengan adanya imbalan yang diterima, tentu saja mereka bukan orang-orang yang netral di dalam pemberitaannya. Dari sinilah kita mengenal apa yang disebut sebagai media partisan. Konsekuensinya adalah munculnya hoax yang seringkali memecahbelah masyarakat berdasarkan siapa yang memberikan imbalan. Sayangnya, semua kontestan melakukan hal yang sama sehingga terlahirlah kubu-kubu yang saling berlawanan. Meminjam terminology yang digunakan dalam dunia perfilman, kubu-kubu ini memiliki pahlawan (protagonis)-nya sendiri dan juga memiliki penjahat (antagonis)-nya sendiri.

Dalam kajian sosial, kehadiran media sosial sebagai bagian dari hidup bermasyarakat kita melahirkan situasi yang disebut sebagai post-truth. Post-truth merupakan kata yang paling sering dipakai pada tahun 2016 terutama dalam pemilu di Amerika yang menghasilkan Donald Trump sebagai Presiden dan dalam isu Brexit yang menghasilkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Kata ini menunjuk pada situasi di mana orang tidak merasa perlu mencari apa yang benar, tetapi mencari apa yang membenarkan prasangka yang mereka miliki karena hal tersebut menguntungkan diri atau kelompoknya. Efek negatif dari situasi ini adalah sikap tidak mempertanyakan lagi apa yang mereka yakini meski di sana ada keraguan (James Ball, 2017, 18-19).

Post-truth menjadikan mana yang dianggap sebagai kebenaran tidak jelas lagi. Orang bahkan tidak lagi sependapat tentang apa yang jahat, korup ataupun yang pembohong. Dalam konteks pemilu, hal ini melahirkan kelompok-kelompok yang punya standard masing-masing tentang apa yang dianggap sebagai yang benar, juga tentang apa yang dianggap sebagai yang salah. Noda hitam yang terlanjur ditumpahkan kepada pihak yang berseberangan membuat kita kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa adanya kemungkinan kebaikan di pihak lain tersebut. Sementara cat putih yang terlanjur diterakan pada mereka yang kita dukung membuat kita begitu kecewa mengapa bukan mereka yang mengalami kemenangan. Situasi yang demikian membuat kita mengalami eskalasi kekecewaan. Jurang antara yang baik dan yang buruk tampak menganga dan sulit untuk kita menerima kenyataan bahwa “Yang dalam pandangan kita buruk”

sebagai pihak yang harus menang atau “yang dalam pandangan kita baik” sebagai pihak yang kalah.

Seperti pernah terjadi di dalam sejarah, kebaikan dan keburukan dari seorang pemimpin hanya akan terbukti dalam perjalanan waktu. Kembali mengingat konsekuensi dari demokrasi, ada kalanya kita berdebat mengusulkan pendapat kita, tetapi harus tiba juga waktunya kita menerima keputusan bersama. Di titik ini, media sosial memang berperan untuk atas munculnya eskalasi kekecewaan di tengah masyarakat. Tentu hal yang sama sebenarnya melahirkan eskalasi kebahagiaan di antara mereka yang memenangkan pemilu. Namun, tetap saja manusia selalu punya kesempatan untuk menguasai dirinya sendiri sehingga tidak hanyut dalam arus media sosial.

### **Menjadi Rasional**

Pemilu sebagai sarana untuk menentukan siapa yang berkuasa bukanlah satu-satunya upaya untuk mengupayakan kebaikan hidup bersama. Euforia kemenangan dan eskalasi kekecewaan perlahan akan berubah menjadi keharusan menjalani perjuangan hidup bersama sebagai bangsa. Cita-cita kita untuk ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,’ tetaplah harus diperjuangkan bersama.

Kekecewaan dan kegembiraan adalah terminologi yang menggambarkan perasaan. Memang penting bagi kita untuk menggunakannya karena memang pemilu membawa situasi yang menggembirakan dan mengecewakan, tetapi terminologi pemikiran (rasionalitas ) juga harus dilibatkan. Dalam menerima hasil pemilu rupanya harus menggunakan kata realitas hasil di lapangan. Pada waktunya ketika hiruk pikuk pemilu sudah berlalu, yang tersisa bagi kita adalah perjuangan bersama. Tidak ada lagi kubu 01, 02, atau 03. Yang ada adalah warga negara Indonesia yang bersatu, dan berdaulat. Pemilu membuat warga bangsa ini mengarusutamakan perhatiannya pada urusan membela calon yang mereka usung. Pengarusutamaan ini membuat sesama warga bangsa saling berhadapan satu dengan yang lain sebagai bagian dari calon tertentu. Tidak jarang pembicaraan tentang hal ini menghadirkan perpecahan dan konflik di

berbagai tingkatan mulai dari keluarga sampai ke tingkat nasional. Paska pemilu, sekat-sekat tersebut semestinya tidak menjadi yang utama lagi. Perhatian kita berpindah kepada berbagai masalah bangsa yang lain. Perjuangan melawan kemiskinan, membangun persaudaraan lintas batas agama-suku-dan golongan, menopang pendidikan yang baik serta upaya menyediakan lapangan pekerjaan menjadi perjuangan bersama. Dalam hal ini, kita tidak lagi saling berhadapan muka sebagai yang saling berlawanan. Kita berjalan bersama menuju perbaikan bangsa Indonesia.

Pemilu harus berjalan dan keputusan pada akhirnya harus diterima. Presiden dan wakil presiden terpilih tetaplah menjadi presiden dan wakil presiden bangsa Indonesia. Kekecewaan dan ketidakstabilan politik adalah konsekuensi dari negara demokrasi. Namun, di sisi yang lain, perjuangan bersama yang tidak pernah berhenti, juga merupakan konsekuensi yang harus diterima sebagai bangsa yang masih berjuang demi cita-cita bersama. Dalam pemilu kita sudah bermusyawarah. Harus tiba waktunya kita bermufakat demi kebaikan bersama.

Martinus Joko Lelono

Pengajar di Universitas Sanata Dharma